

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan merupakan unsur terpenting di dalam bisnis, karena ini yang menjadi penentu usaha akan berkembang atau sebaliknya. Globalisasi pasar keuangan yang terjadi saat ini menuntut perusahaan untuk menyajikan pelaporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Laporan keuangan perusahaan merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut (Rahmadana, 2021).

Menurut PSAK (2015) menyatakan bahwa penggunaan laporan-laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, kariawan, pemberi pinjaman, pemasok usaha kreditor lainnya, pelanggan pemerintah, serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Dengan demikian pelaporan keuangan harus dapat menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, prestasi perusahaan dalam satu periode, dan menyediakan informasi-informasi yang dapat membantu pihak yang membutuhkan laporan keuangan agar mereka dapat mengambil keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Pengungkapan pelaporan keuangan merupakan mekanisme yang paling efektif dan efisien untuk mendorong pemimpin dalam pengelolaan perusahaan. Pemimpin akan termotivasi untuk mengelola perusahaan lebih baik jika informasi dalam pelaporan keuangan memiliki kualitas yang lebih baik (Amalia, 2014).

Perkembangan Ekonomi Indonesia saat ini sangat memerlukan sektor lembaga keuangan untuk menyediakan dana yang dibutuhkan masyarakat baik untuk keperluan konsumtif baik untuk keperluan modal kerja. Keberadaan lembaga keuangan akan sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia terutama di daerah pedesaan. Untuk mencegah kekurangan dana maka pemerintah memberikan izin berdirinya lembaga-lembaga keuangan selain bank, seperti BPR dan LPD. Lembaga keuangan sangatlah besar peran dan keikutsertaannya dalam pembangunan ekonomi Negara, dimana keberadaan lembaga keuangan berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian Indonesia. (Apriana, 2020)

Untuk Pemerintah Tingkat Bali 1, melalui surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali No. 972 Tahun 1984, membentuk suatu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menunjang serta meningkatkan perekonomian Desa Pekraman di Bali lembaga ekonomi tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sejak saat itu LPD telah cukup berperan di dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat dan

pemberian modal efektif serta membantu menunjang program pemerintah pemberantas kemiskinan.

Peranan LPD sangatlah penting dalam meminjam modal kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Menurut Cahyadi (2014), Landasan operasional LPD berpegang pada *awig-awig desa pakraman*, yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar warga *desa pakraman*. Berbagai kalangan masyarakat yang memperhatikan perekonomian di Bali berharap agar perekonomian Bali kedepannya mampu lebih memanfaatkan potensi lokal di dalam membangun perekonomian di Bali.

Selain banyak keuntungannya ada juga yang memanfaatkan LPD sebagai ladang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa kasus yang berhasil terungkap yang terjadi di beberapa desa di Bali dan membuktikan tingkat kecurangan di LPD cukup tinggi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di salah satu LPD di Kecamatan Abiansemal, yaitu terkait kasus dugaan korupsi Rp. 130 Miliar di LPD Desa Adat Sangeh. Kejari Badung, sedang mengusut adanya dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, di Kabupaten Badung, Bali. Dari hasil penyelidikan dugaan sementara kerugian keuangan desa berdasarkan hasil audit yang diserahkan oleh Bendesa Adat Sangeh, kurang lebih sebesar Rp 130.869.196.075,68. Selama penyelidikan tim penyelidik telah memeriksa sebanyak 18 orang saksi, antara lain dari pihak Ketua LPD, pengurus LPD, Badan Pengawasan periode terdahulu serta badan pengawasan yang menjabat saat ini.

Sementara, dari hasil penyelidikan ditemukan beberapa kelemahan yang membuat LPD Sangeh menderita kerugian antara lain, tidak memiliki SOP secara tertulis baik dalam hal pemberian pinjaman, simpanan berjangka dan tabungan. Kemudian, kurangnya kompetensi dan kejujuran SDM dalam menyusun laporan keuangan dan dalam menyusun laporan keuangan tidak mencatat secara real time.

Selain itu, LPD Desa Adat Sangeh tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit serta juga lemahnya pengendalian prosedur pemberian kredit oleh LPD Desa Adat Sangeh dan tidak melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksana peraturan daerah Provinsi Bali, Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam mengelola likuiditas keuangannya (VOI, 2022).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008).

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Ada lima prinsip utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/kesetaraan. Kelima prinsip *good corporate governance* ini penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan (Hendrik, 2016). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hayyuning Tyas (2011), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Vita (2020), dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Budaya Tri Hita Karana Sebagai Variable Moderasi Pada Kualitas Laporan Keuangan.

Pemahaman akuntansi sangatlah diperlukan dalam membuat atau menyusun suatu laporan keuangan. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri (Nudilah, 2016). Penelitian mengenai pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Pebriantari (2021), Novi (2019) dan Kusuma (2018) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Ayu (2019) dalam penelitiannya menyebutkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017, tentang pengurus dan pengawas LPD pasal 445, menyatakan bahwa yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan LPD adalah badan pengawas LPD. Fungsi badan pengawas adalah sebuah aktivitas konsultasi dan meningkatkan operasi organisasi. Badan pengawas membantu organisasi memenuhi tujuan melalui pelaksanaan evaluasi dengan pendekatan disiplin dan sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen, pengendalian proses tata kelola resiko. Keefektifan badan pengawas diperlukan untuk perencanaan dan pelaporan yang hasilnya akan dievaluasi oleh komite audit (Teja, 2020)

Badan pengawas adalah badan yang bekerja dimana tugas pokoknya yaitu menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam suatu perusahaan telah dipatuhi, mengawasi kegiatan yang berlangsung didalam sebuah perusahaan, dan menentukan kehandalan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun peranan penting adanya badan pengawas, yaitu untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan. Berkenaan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh badan pengawas, guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, handal, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Penelitian mengenai pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Novi (2019) dan Agus (2019) mendapatkan hasil bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Pebriantari (2021), Pebriartini (2020) , dan Dewi (2019) dalam penelitiannya tentang fungsi badan pengawas mendapatkan hasil bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Teknologi informasi merupakan teknologi informasi yang merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuk. Penggunaan teknologi informasi sangat tergantung dari pemakainya, apabila pemakai menjalankan teknologi informasi dengan baik, maka teknologi informasi berjalan dengan baik dan efektif

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam era globalisasi ini dapat dimanfaatkan dalam bidang pemerintahan. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampaun dalam mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Mustafa, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2019) dan Harnoni (2016) menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Pebriantari (2021), Paramitha (2019) dan Nurlillah (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor eksternal adalah yang berada diluar kendali organisasi dan berpengaruh secara signifikan pada rencana strategik dan rencana operasional

sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output termasuk laporan keuangan (Sukmaningrum, 2012).

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar suatu individu atau suatu organisasi, dimana faktor eksternal ini bisa berasal dari lingkungan sekitar. Dalam ruang lingkup perusahaan Faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*). Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun kondisi realitasnya di lapangan.

Dalam mengelola organisasi, seringkali pimpinan dan jajaran manajemen kurang memberikan perhatian terhadap kondisi eksternal organisasi tersebut, dan terlalu fokus terhadap kondisi internal. Akibatnya, strategi yang diterapkan kurang sesuai dengan kondisi lingkungan, dan justru berakibat pada kegagalan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Tantriani (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Rizki (2018) dan Harlinda (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul penelitian, yaitu **“Pengaruh Good Corpotare Governance, Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Eksternal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD Kecamatan Abiansemal”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?
2. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?
3. Apakah fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?
5. Apakah faktor eksternal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh faktor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis muncul akibat peneliti tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tertentu sehingga peneliti melakukan penelitian kembali. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali. Namun dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian, sehingga dilakukan penyidikan kembali secara empiris.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perusahaan-perusahaan khususnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan pentingnya penerapan *good corporate governance* terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau Lembaga Perkreditan Desa, dan pentingnya pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, dan faktor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan atau lembaga pemetintah daerah itu sendiri.

b. Bagi Mahasiswa

Merealisasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan serta dipelajari mahasiswa pada bangku kuliah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman dan wawasan mengenai *good corporate governance*, pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, dan faktor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan, serta memberi tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya.

c. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan di perpustakaan bagi mahasiswa dimasa yang akan datang sebagai bahan pertimbangan atau pengembang ilmu akuntansi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kelembagaan Lama

Teori kelembagaan atau *Institusional Teory* adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu perubahan dapat bertumbuh dan berkelanjutan ketika berada dalam lingkungan yang kompetitif yang penuh dengan para pesaing, dan perubahan memiliki kemampuan dalam menggandeng *skateholder*.

Teori kelembagaan muncul disebabkan karena adanya rasa ketidakpuasan dan rasa tidak percaya terhadap teori neoklasik. Hasibuan (2008), (dikutip oleh Santoso, 2008) menyatakan bahwa inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Terdapat dua teori yang berkaitan dengan teori kelembagaan ini yaitu teori kelembagaan lama (*old institutional theory*) dan teori kelembagaan baru (*new institutional theory*).

Ekonomi kelembagaan hadir sebagai gagasan yang menolak pemikiran klasik yang mengabaikan faktor-faktor kelembagaan (nilai-nilai, budaya dan *rule of life*) dalam aktifitas ekonomi. Pemikir ekonomi kelembagaan percaya bahwa perilaku manusia terbentuk dari lingkungan di mana mereka hidup dan dibesarkan sehingga kelembagaan dapat bersumber dari budaya dan

kebiasaan sehari-hari dalam lingkungan tersebut. Veblen mengedepankan evolusi pemikiran yang berdasar pada kondisi lingkungan sosial tempat individu hidup, Commons menitikberatkan pada multidisiplin ilmu dalam menjelaskan ilmu ekonomi, Mitchell menitikberatkan pada karakter perilaku berdasar kelembagaan lokal dan Ayres menitikberatkan pada perubahan kelembagaan desa (Firmansyah, 2020).

Di dalam teori kelembagaan lama, menurut Louis (2016), dalam Nudilah (2016) mempercayai bahwa masyarakat mengidentifikasi suatu organisasi berdasar norma dan nilai yang dianut organisasi tersebut. *Old institutional theory* menurut Burn (2016), dalam Nudilah (2016) digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama dalam suatu organisasi, obyek analisis dalam teori kelembagaan lama adalah individu sedangkan pada teori kelembagaan baru obyek analisisnya adalah organisasi.

Sehingga penelitian ini menggunakan *Old Institutional Theory* karena yang diteliti adalah karakter orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) yaitu prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diterapkan, kemudian fungsi badan pengawas dalam melakukan tugasnya, pemahaman akuntansi dari karyawan yang membuat laporan keuangan, pemanfaatan teknologi dari karyawan dalam membuat laporan keuangan dan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh karyawan itu sendiri.

2.1.2 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan implementasi *good corporate governance* / penerapan *good corporate governance*, maka pengelolaan sumberdaya kelembagaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan kelembagaan tersebut (Theresia, 2012).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008).

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Penerapan *Good Corporate Governance* juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya.

Adapun 5 prinsip dasar *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain.

3. Tanggung Jawab

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran Dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3 Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi merupakan salah satu kunci dalam menawarkan dan digunakan sebagai pemanfaatan laporan keuangan. Pendidikan Akuntansi diajarkan dalam mendidik mahasiswa perguruan tinggi sehingga mempunyai pengetahuan dalam bidang akuntansi. Dalam penyusunan laporan keuangan, seorang akuntan mempunyai pemahaman terhadap isi dalam laporan keuangan tersebut, sehingga dapat membuat keputusan untuk dilaksanakan (Nuraini, 2007).

Semakin luas memiliki pemahaman akuntansi maka akan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sedangkan jika seorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi, maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam laporan keuangan, serta tidak adanya kualitas dalam laporan keuangan tersebut, karena pemahaman akuntansi yang kurang dimiliki oleh akuntannya sehingga membuat pelaporan keuangan menjadi kurang akurat (Novi, 2019).

Tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki khususnya pengelola LPD bagian keuangan dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan yang disajikan LPD tersebut. Pemahaman akuntansi yang baik yang dilakukan oleh staf keuangan akan mengurangi kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga output laporan keuangan yang disajikan berkualitas, dapat berguna bagi stakeholdernya, dan berfungsi sebagai pengambil keputusan kinerja LPD berikutnya. Apabila tingkat pemahaman akuntansi semakin meningkat maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan LPD tersebut.

2.1.4 Fungsi Badan Pengawas

Badan pengawas adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kualitas informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi (Mulyadi, 2012).

Institute of Internal Auditors dalam Boynton and Kell (2013) telah menetapkan lima standar praktik pemeriksaan yang mengikat anggota-anggotanya, yang meliputi masalah independensi, keahlian profesional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian pemeriksaan intern. Norma Pemeriksaan intern tersebut merupakan indikator yang menentukan kualitas jasa badan pengawas dalam melaksanakan praktik pemeriksaan. Kalau dikaitkan dengan tugas badan pengawas yang melakukan pemeriksaan atas kegiatan LPD, semakin lengkap indikator tersebut dipatuhi oleh badan pengawas, maka semakin berkualitaslah hasil pemeriksaan yang dilakukannya dan semakin berkualitaslah informasi akuntansi yang dihasilkan oleh LPD.

Peran badan pengawas intern dalam mengawasi operasional LPD bisa dilakukan oleh siapa saja di desa pekraman bersangkutan tanpa mengenal jenjang dan jenis Pendidikan. Semakin besar asset LPD, maka ruang lingkup pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks, dengan sendirinya memerlukan pengetahuan dan kompetensi yang semakin khusus (Novi,2019).

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan teknologi informasi yang merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuk. Penggunaan teknologi informasi sangat tergantung dari pemakainya, apabila pemakai menjalankan teknologi informasi dengan baik, maka teknologi informasi berjalan dengan baik dan efektif. Kebutuhan akan informasi yang cepat, andal dan akurat dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian mutlak diperlukan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika perusahaan melakukan investasi dibidang teknologi informasi (Rahmawati, 2008).

Husna (2017) berpendapat bahwa pemanfaatan informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Menurut Jen (2002) berpendapat bahwa semakin tinggi keterlibatan pemakai akan meningkatkan kinerja sistem informasi. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan SDM untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan produktifitas kerja. Di dalam sistem informasi akuntansi akan tinggi apabila program dan pelatihan pemakai diperkenalkan.

2.1.6 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar suatu individu atau suatu organisasi, dimana faktor eksternal ini bisa berasal dari lingkungan sekitar. Dalam ruang lingkup perusahaan Faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*). Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun kondisi realitasnya di lapangan.

Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya, contohnya: kebijakan pemerintah membuka peluang investasi asing. Sedangkan *Threat* atau ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menjadi penghambat terwujudnya tujuan organisasi, contohnya: resesi global dan tingkat inflasi yang tinggi.

Dalam melakukan analisis terhadap faktor eksternal, pimpinan organisasi dapat menggunakan dua model analisis, yaitu analisis makro dan analisis industri. Analisis faktor makro merupakan metode yang memuat 6 analisis lingkungan eksternal, atau lebih dikenal dengan sebutan PESTEL (*Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Legal*). Metode analisis berikutnya yang dapat digunakan adalah menganalisis industri terkait, yaitu dengan metode *Porter's 5 Forces* (*Competitive Rivalry, Customer Supplier, New Entrants, Consumer and Substitution*).

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu, mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting (Akhmad, 2014).

Definisi kualitas menurut Mulyana (2010:96) adalah kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Sedangkan laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

Kualitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai kesesuaian suatu laporan keuangan dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan keuangan.

2.1.8 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Pekraman, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik Desa Pakraman didalam bentuk simpan pinjam. Pengertian LPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Pasal 2 merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. LPD ini dapat didirikan pada desa dalam wilayah kabupatenkota, di mana dalam tiap-tiap desa hanya didirikan satu LPD, pengertian LPD berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1998 menyatakan bahwa LPD adalah lembaga perkreditan desa yang merupakan suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat.

Pendirian LPD dapat dilakukan apabila sudah mendapatkan izin pendirian. Izin pendirian LPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari BupatiWalikota. LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,- sepuluh juta rupiah, di mana modal LPD menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 terdiri dari:

1. Swadaya masyarakat dan atau urunan krama desa.
2. Bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat
3. Laba yang ditahan.

Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002, disebutkan bahwa LPD dapat didirikan apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah memiliki awig-awig tertulis
2. Ditinjau dari segi sosial ekonomi, desa tersebut cukup potensial untuk berkembang.

LPD dilarang menanamkan modal pada perusahaan atau usaha milik anggota masyarakat atau milik perorangan atau perusahaan berbadan hukum di manapun pasal 7 ayat 2. Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan usaha LPD yang terutama ditunjukkan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di desa. Ketentuan ini juga didasarkan pada pertimbangan penghindaran risiko ikut menanggung kerugian apabila perusahaan tempat menanam modal mengalami kerugian atau masalah lain yang dapat merugikan LPD. LPD hanya dapat menanamkan modalnya kepada usaha milik desa.

Peranan LPD sangatlah penting dalam meminjam modal kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Menurut Cahyadi (2014), Landasan operasional LPD berpegang pada awig-awig desa pakraman, yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar warga desa pakraman. Berbagai kalangan masyarakat yang memperhatikan perekonomian di Bali berharap agar perekonomian Bali kedepannya mampu lebih memanfaatkan potensi lokal di dalam membangun perekonomian di Bali agar lebih maju dan berkembang.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan, karena dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Cyntia (2021) dalam penelitiannya tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kota Denpasar dengan teknik analisis analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan LPD di Kota Denpasar.

Pebriantari (2021) dalam penelitiannya tentang pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Gianyar, dengan metode purposive sampling sebagai metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi badan pengawas dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Pebriartini (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kota Denpasar, dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Teja (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh etika kepemimpinan, tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Risa (2020) pada penelitiannya tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Badung dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung.

Janet (2020) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Ambon, dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini dibuktikan dengan nilai

signifikan dari hasil perhitungan faktor eksternal lebih besar dari nilai signifikansi 5%.

Vita (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh *good corporate governance* dan budaya tri hita karana sebagai variable moderasii pada kualitas laporan keuangan, dengan Teknik analisis yang digunakan adalah *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 diterima, hal ini berarti *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Novi (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh pemahaman akuntansi, etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan sampel jenuh (sensus), dan alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Nusa Penida.

Kusuma (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Tampaksiring, dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi badan

pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Mursidah (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada perusahaan asuransi AJB Bumiputera KC LHOKSEUMAWE dan PT. Taspen KC LHOKSEUMAWE) dengan teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 17. Hasil penelitian menyatakan menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Gunadi (2017) dalam penelitiannya tentang etika kepemimpinan dan dan fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan lembaga perkreditan desa dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan LPD.

Harlinda (2016) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan pemerintah daerah dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor eksternal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Nurlillah (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Siti (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tantriani (2012) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor eksternal berperan sebagai variable bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintah tidak dapat diakomodasikan oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.

Hayyuning (2011) dalam penelitiannya tentang sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan, dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.